
**MODEL PENGEMBANGAN KAPASITAS ADAPTIF PEMERINTAH DAERAH
(STUDI : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

¹⁾Abdul Jabbar, ²⁾Sangkala, ³⁾Hasniati, ⁴⁾Muhammad Rusdi

¹⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

^{2), 3), 4)} Magister Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin Makassar

¹⁾jbr.nyonk1@gmail.com, ²⁾sangkalarewa@gmail.com, ³⁾hasniatihamzah@gmail.com,

⁴⁾mrusdi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan Model Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis Penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan serta menggunakan alat bantu analisis dengan aplikasi N-VIVO. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah menurut Grindle yang memfokuskan pada dimensi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penguatan Organisasi, dan Pembaharuan Institusional memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. 2). Model Program Transformasi Agrobisnis Kabupaten Sidenreng Rappang (PATARAKASI) dapat dijadikan sebagai strategi adaptif dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor pertanian sekaligus sebagai langkah inisiatif secara holistik yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas adaptif pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan demi terwujudnya visisebagai daerah Agrobisnis yang Maju.

Kata kunci : Kapasitas Adaptif, Produktivitas Pertanian.

Abstract

This research aims to describe, analyze and find a Regional Government Adaptive Capacity Development Model in Increasing Agricultural Productivity in Sidenreng Rappang Regency. This type of research is descriptive qualitative. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data, presenting and drawing conclusions and using analysis tools with the N-VIVO application. The data collection techniques used in this research are observation techniques, direct interviews and documentation. The results of this research show that 1).

According to Grindle, the Adaptive Capacity of Regional Government which focuses on the dimensions of Human Resource Development, Organizational Strengthening and Institutional Renewal has a significant influence in increasing agricultural productivity in Sidenreng Rappang Regency. 2). The Sidenreng Rappang Regency Agribusiness Transformation Program Model (PATARAKASI) can be used as an adaptive strategy in responding to changes occurring in the agricultural sector as well as a holistic initiative that aims to develop the adaptive capacity of the Sidenreng Rappang Regency regional government in increasing sustainable agricultural productivity for the sake of realizing vision as an advanced agribusiness area.

Keywords: Adaptive Capacity, Agricultural Productivity.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur didalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang- undang tersebut yang dimaksud prinsip otonomi yang seluas luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dandaya saing daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah sejatinya merespon dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerah.

Menghadapi konsekuensi berbagai dari perubahan yang terjadi, lembaga pemerintah diharapkan harus mampu menyesuaikan diri dengan peliknya situasi dengan menjadi lembaga yang adaptif (*Adaptive Situation*) (Termeer et al, 2015). Dalam konteks fenomena perubahan, terdapat berbagai jenis ambiguitas dan ketidakpastian, dan peran pemerintah yang signifikan disini tidak hanya dalam mengatasi masalah perumusan dan implementasi solusi, tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas adaptif melalui suatu kebijakan. Ketahanan daerah dalam menghadapi dampak perubahan ditingkatkan dengan tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat.

Salah satu wilayah sentra produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan yang dijuluki kota beras atau lumbung beras yaitu Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang) dengan luas areal persawahan potensial ± 44.958 Ha yakni 23,87persen luas wilayah Kabupaten Sidrap (Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap, 2021). Sebanyak 5 juta Ton beras dihasilkan oleh Sulawesi Selatan yang tentunya tidak terlepas dari kontribusi beras dari Kabupaten Sidrap sebanyak 18-20 persen (BPS, 2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023 maka ditetapkan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemerintahan Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si yakni Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”.

Perkembangan produksi padi sawah daerah Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel. 1 Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Sidrap Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Produksi (Ton GKG)
1.	2016	587.983
2.	2017	665.287
3.	2018	536.050
4.	2019	515.012
5.	2020	443.799

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Pada Tabel 1 menunjukkan tingkat produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang bergerak fluktuatif, pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan produksi dalam setiap tahunnya. Ditahun 2020, tingkat penurunan produksi padi sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan dan langkah adaptif pemerintah daerah dalam merespon perubahan tingkat produktivitas pertanian secara tepat dan berkelanjutan agar hasil produksi padi bisa ditingkatkan kembali.

Berdasarkan hasil observasi calon peneliti, penurunan tingkat produksi padi di Kabupaten Sidrap disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 1). Dampak perubahan iklim global, yaitu perubahan pola dan intensitas curah hujan yang menyebabkan terjadinya kekeringan dan banjir, 2). Meningkatnya alih fungsi lahan, 3). Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian berbasis teknologi tepat guna, 4). Degradasi kualitas lahan yang disebabkan oleh penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan, 5). Ketersediaan benih/bibit unggul bermutu yang belum tercukupi, 6). Rendahnya kapasitas kelembagaan petani dan SDM pertanian, 7). Kelangkaandan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi ke petani, 8). Tingginya harga obat- obat pertanian, serta 9). Kurangnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Data dan fakta diatas menunjukkan jika pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan memiliki kapasitas atau kemampuan adaptasi dalam hal pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan responsif dalam pembuatan kebijakan pada sektor pertanian sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Milen dalam Andi Samsu Alam (2015) menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas adalah kegiatan atau bisa disebut juga dengan tahapan dimana suatu individu, kelompok, organisasi, lembaga dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dan nanti dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinyadalam menyelesaikan masalah dan paham terhadap masalah kebutuhan yang diperlukan.

Berbagai persoalan yang diuraikan mendorong pemerintah untuk bersikapadaptif dalam merespon perubahan tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Konsep yang dikemukakan oleh Grindle akan digunakan untuk mengukur seberapa adaptifnya pemerintah untuk menjadikan organisasinya efektif, lebih terarah, meningkat dari segi kinerja. Sebagai programyang banyak berhubungan langsung dengan proyek pembangunan Negara

dunia ketiga, pengembangan kapasitas (*capacity building*) ini telah menjadi bagian sangat penting dalam pembahasan lembaga internasional; *united nations* yang memberi rujukan "*capacity building*". Grindle dalam (Norman dkk., 2020) menjelaskan jika proses pengembangan kapasitas adaptif pemerintah terdapat dimensi dan memfokuskan kegiatan pada : 1). Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2). Penguatan Organisasi, 3). Pembaharuan/Reformasi Institusional.

Urgensi penelitian ini memfokuskan pada pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produktivitas pertanian khususnya tanaman padi, dapat diartikan bahwa kemampuan pemerintah untuk merespon tantangan dan mencari solusi melalui pembelajaran, manajemen organisasi, mengembangkan pengetahuan dan menformulasikan pendekatan yang efektif. Perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian di Kabuptaen Sidenreng Rappang sangat dibutuhkan,

karena pertanian menjadi pendapatan mayoritas masyarakat dan kontribusi pertanian sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan berangkat dari berbagai argumen, fakta empirik dan sumber kepustakaan, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : “Model Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah : (Studi Peningkatan Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan fokus pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang dalam peningkatan produktivitas pertanian. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara langsung dengan aktor atau instansi yang telah ditentukan sebagai informan dan data sekunder melalui dokumen resmi pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan studi kepustakaan lainnya seperti buku, berita surat kabar dan dokumen hasil riset. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sertamenggunakan alat bantu analisis dengan aplikasi N-VIVO.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan proses pelayanan publik yang dilakukan sejatinya melayani petani sebagai warga negara, bahkan lebih dari itu harus mampu membangun kepercayaan dan berkolaborasi dengan petani sebagai warga negara bukan hanya sebatas merespon keinginan pelanggan (*customer*). Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu membangun kebersamaan dalam mengedepankan pemecahan masalah dan pencapaian dalam kepentingan publik terutama dalam peningkatan produktivitas pertanian.

Hasil penelitian ini menunjukkan jika konsep yang tepat untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu konsep *New Public Service (Serving)*. Konsep *New Public Service (NPS)* menekankan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang responsif dan berorientasi pada hasil. Dan konsep ini membawa paradigma baru dalam peran pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas adaptif dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sekaligus upaya mencapai Visi Agrobisnis yang Maju. Di bawah kerangka NPS, peran pemerintah daerah akan terfokus pada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, keterlibatan aktif dalam solusi berbasis bukti, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar.

Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan dan menganalisis kapasitas adaptif pemerintah dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Grindle (1997) bahwa pengembangan kapasitas adaptif sebagai *ability to perform*

appropriate task effectively, efficiently and sustainable (kemampuan untuk melakukan tugas yang sesuai secara efektif, efisien dan berkelanjutan) dan dalam proses pengembangan kapasitas adaptif terdapat dimensi dan memfokuskan kegiatan pada : 1). Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2). Penguatan Organisasi, 3). Pembaharuan/Reformasi Institusional.

Perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat dibutuhkan, karena pertanian menjadi pendapatan mayoritas masyarakat dan kontribusi pertanian sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh petani dan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan diharapkan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut, sehingga penelitian ini dianggap penting dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi, karena sumber daya manusia merupakan perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Sumber daya manusia sangat penting karena memiliki proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, serta melakukan memotivasi terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi.

Ket Tabel 2 : Aspek paling dominan terkait Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam hal **Pengembangan Sumberdaya Manusia** untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang

Aspek	BAPPELITBANGD A	Dinas Tanaman Pangan	DPRD	Kelompok Tani	Organisasi Profesi Tani	Total
Iklm Lingkungan Kerja	0%	25%	0%	50%	0%	25%
Rekrutmen	0%	12,5%	100%	25%	0%	18,75%
Reward	0%	25%	0%	0%	100%	25%
Training	100%	37,5%	0%	25%	0%	31,25%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Hasil Olahan Data N Vivo, 2023

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan hasil olahan data menggunakan aplikasi N Vivo dengan nilai rata-rata persentase aspek training sebesar 31,25 %, aspek reward sebesar 25 %, Iklm lingkungan kerja sebesar 25 % dan aspek rekrutmen sebesar 18,75 %. Maka peneliti berkesimpulan jika pengembangan sumber daya manusia berperan aktif dan dominan dalam mengukur kemampuan atau kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Temuan peneliti dari 4 (empat) aspek yang dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam hal Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu

training, reward, iklim lingkungan kerja dan rekrutmen maka aspek training menjadi dominan. Training atau Pelatihan/Pendampingan yang dibutuhkan oleh kalangan petani yaitu dalam bentuk studi lapang (paktik langsung), tidak sekadar di sosialisasikan namun ada praktik lapangan terkait beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kalangan petani seperti praktik pencegahan hama dan penyakit pertanian, penggunaan pupuk yang efektif dan penggunaan bibit unggul sehingga dapat menunjang peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, aspek iklim lingkungan kerja diharapkan pemerintah daerah mampu melakukan langkah-langkah antisipatif (manajemen risiko) terhadap faktor cuaca yang tidak menentu, sehingga tidak terlalu berdampak pada turunnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja SDM pertanian dan petani, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan anggaran untuk pemberian reward, karena hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas pertanian. Keterbatasan jumlah SDM pertanian dalam hal ini penyuluh pertanian di tingkat desa dan rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian menjadi alasan utama sehingga aspek rekrutmen menjadi penting untuk segera di follow up oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Penguatan Organisasi

Penguatan organisasi memegang peranan penting dalam membantu organisasi untuk mengubah dirinya sendiri melalui strategi yang sangat terencana dan dengan prediksi masalah yang kemungkinan dapat diatasi melalui solusi-solusi yang diberikan. Penguatan organisasi akan mengfokuskan pada proses dan struktur yang dapat memengaruhi bagaimana organisasi menetapkan tujuannya dalam menyusun pekerjaannya secara intensif. Manajemen dan struktur organisasi yang baik dan tepat dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi.

Ket Tabel 3 : Aspek paling dominan terkait Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam hal **Penguatan Organisasi** untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang

Aspek	BAPPELITBANGD A	Dinas Tanaman Pangan	DPRD	Sekretaris Daerah	Total
Budaya Organisasi	0%	14,29%	0%	33,33%	15,38%
Kepemimpinan	0%	14,29%	0%	33,33%	15,38%
Kinerja Organisasi	50%	28,57%	0%	0%	23,08%
Komunikasi dan Koordinasi	0%	14,29%	0%	33,33%	15,38%
Manajemen Organisasi	50%	28,57%	100%	0%	30,77%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Hasil Olahan Data N Vivo, 2023

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan hasil olahan data menggunakan aplikasi N Vivo dengan nilai rata-rata persentase aspek Manajemen Organisasi sebesar 30,77 %, aspek Kinerja Organisasi sebesar 23,08 %, aspek Budaya Organisasi sebesar 15,38 %, aspek Kepemimpinan sebesar 15,38 % dan aspek Komunikasi/Koordinasi sebesar 15,38 %, maka peneliti berkesimpulan jika penguatan organisasi menjadi pondasi yang sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sektor pertanian dan peningkatan produktivitasnya. Temuan peneliti dari 5 (lima) aspek yang dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam hal Penguatan Organisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa manajemen organisasi dan kinerja organisasi memainkan peran sentral dalam pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah, terutama dalam konteks peningkatan produktivitas pertanian. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai *leading sector* diharapkan pro aktif dalam melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dijalankan sebagai pendekatan berbasis bukti dalam mengukur pencapaian visi organisasi sebagai Daerah Agribisnis yang Maju. Dengan melakukan pengukuran kinerja yang baik, perencanaan yang terukur, pemantauan yang teratur, tata kelola sumberdaya dan anggaran yang berdasar kebutuhan organisasi, sinkronisasi program berbasis kolaborasi serta respons yang cepat terhadap perubahan, maka organisasi dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pada sektor pertanian terutama dalam peningkatan produktivitas pertanian, aspek budaya organisasi, kepemimpinan dan komunikasi/koordinasi menjadi kunci yang menekankan pada komitmen bersama oleh seluruh stakeholder dalam pencapaian visi organisasi dengan strategi kepemimpinan transformasional dan kolaborasi lintas sektoral untuk sinkronisasi program-program pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Pembaharuan Institusional

Pembaharuan institusional adalah serangkaian tindakan atau perubahan yang diarahkan untuk memperbaiki, mengubah, atau memodernisasi struktur, prosedur, dan mekanisme lembaga atau organisasi tertentu, termasuk dalam organisasi pemerintahan daerah. Pembaharuan institusional sering kali merupakan respons terhadap perubahan lingkungan eksternal, tuntutan masyarakat, atau perubahan dalam visi dan tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk membuat organisasi lebih relevan, responsif, dan efektif dalam mencapai misi dan tujuannya.

Ket Tabel 4 : Aspek Paling Dominan terkait Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam hal **Pembaharuan Institusional** untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang

Aspek	BAPPELITBANGD A	Dinas Tanaman Pangan	Kelompok Tani	Sekretaris Daerah	Total
Pendekatan Sosial Kemasyarakatan	0%	33,33%	25%	0%	25%

Perbaikan Kelembagaan dan Kebijakan	0%	33,33%	25%	100%	33,33%
Sarana dan Prasarana Pendukung	100%	16,67%	25%	0%	25%
Tata Kelola Sistem Pertanian	0%	16,67%	25%	0%	16,67%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Hasil Olahan Data N Vivo, 2023

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan hasil olahan data menggunakan aplikasi N Vivo dengan nilai rata-rata persentase aspek Perbaikan Kelembagaan dan Kebijakan sebesar 33,33 %, aspek Pendekatan Sosial Kemasyarakatan 25 %, aspek Tata Kelola Sistem Pertanian 16,67 % dan aspek Sarana dan Prasarana Pendukung sebesar 25 %, maka peneliti berkesimpulan jika Pembaharuan Institusional dalam sektor pertanian menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan visi Sidrap sebagai daerah agrobisnis yang maju. Temuan peneliti dari 5 (lima) aspek yang dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam hal Pembaharuan Institusional untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa faktor paling dominan yang mendapatkan respon dalam peningkatan produktivitas pertanian adalah aspek perbaikan kelembagaan dan kebijakan. Implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah demi menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa luas tanam panen tanaman padi di Kabupaten Sidenreng Rappang secara signifikan berkurang, di tahun 2017 paling tertinggi seluas 106.328 Ha, sementara pada tahun 2020 luas lahan penanaman padi tersisa 88.296 Ha. Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian. Selanjutnya aspek pendekatan sosial kemasyarakatan, dimana masyarakat petani mengharapkan pemerintah daerah melakukan pendekatan yang lebih inklusif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Sebab, jika hanya pada ruang-ruang formal, terkadang petani merasa ada pembatas komunikasi antara pemerintah dan petani dalam menyampaikan aspirasinya, termasuk dorongan kepada pemerintah daerah dalam memanfaatkan media sosial seperti website pertanian, facebook, instagram, whatsapp dan lainnya untuk digunakan sehingga petani lebih mudah dalam berkomunikasi. Perhatian pemerintah daerah terhadap kemudahan akses petani dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung pertanian seperti jalan tani, irigasi, embung dan waduk juga penting untuk ditindaklanjuti, sekalipun disadari bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama pemerintah daerah sehingga belum mampu memenuhi keinginan masyarakat terkait hal tersebut. Begitupula dengan tata kelola sistem pertanian yang sudah menunjukkan sikap adaptif dengan memanfaatkan modernisasi pertanian diharapkan untuk terus ditingkatkan, karena itu juga akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas pertanian.

4. Model Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian

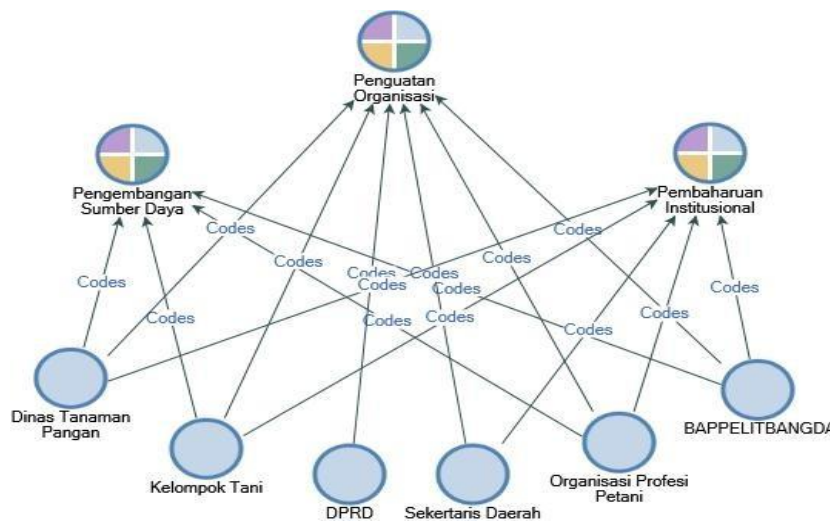
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa model pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah dengan konsep *New Public Service (Serving)* serta menggunakan Model Grindle dalam mengukur kapasitas adaptif pemerintah daerah dengan dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan pembaharuan institusional ternyata dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hal ini bisa menjadi model pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah bukan hanya di Kabupaten Sidenreng Rappang, namun bisa dikembangkan di daerah lain yang ada di seluruh Indonesia.

Ket Tabel : Aspek paling dominan terkait Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Konsep Grindle

Dimensi	BAPPELITBANGD A	Dinas Tanaman Pangan	DPRD	Kelompok Tani	Organisasi Profesi Petani	Sekretaris Daerah	Total
Pembaharuan Institusional	25%	30%	0%	50%	25%	25%	31,71%
Pengembangan Sumber Daya	25%	35%	0%	37,5%	50%	0%	31,71%
Penguatan Organisasi	50%	35%	100%	12,5%	25%	75%	36,59%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Hasil Olahan Data N Vivo, 2023

Ket Gambar 1 : Project Map terkait Digram Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang



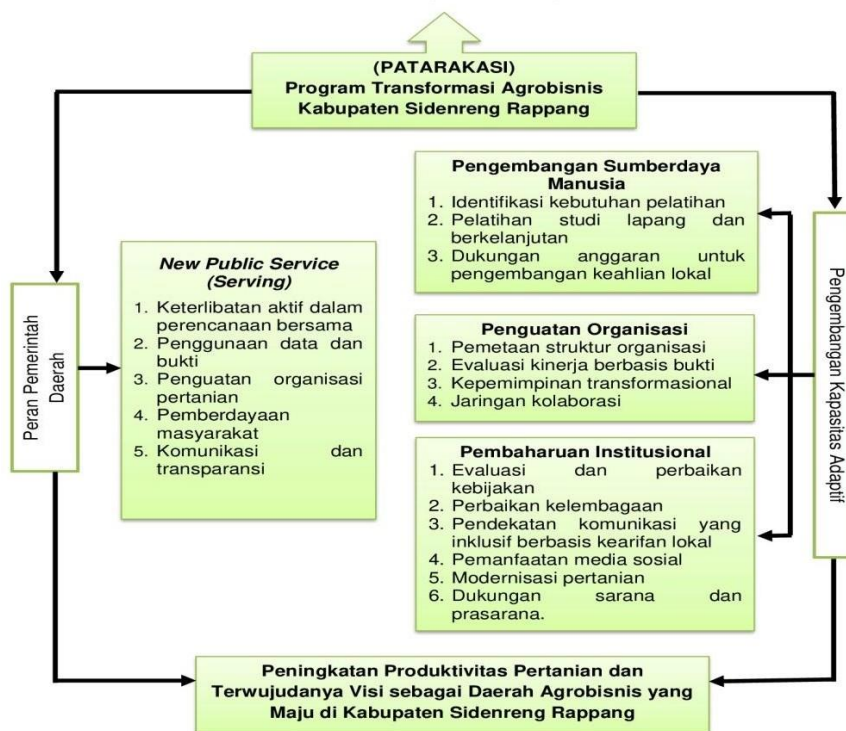
Hasil Olahan Data N Vivo, 2023

Secara keseluruhan dari 3 (tiga) dimensi yang dikemukakan oleh Grindle terkait Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produktivitas pertanian berdasarkan analisis hasil wawancara dan olahan data N Vivo maka dapat disimpulkan jika dimensi Penguatan Organisasi menjadi faktor dominan yang memiliki pengaruh dengan nilai rata-rata persentase sebesar 36,59 %, sementara dimensi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan dimensi Pembaharuan Institusional memiliki nilai rata-rata persentase yang sama sebesar 31,17 %.

Nama Prototype/ Model yang menjadi temuan peneliti adalah : Program Transformasi Agrobisnis Kabupaten Sidenreng Rappang (PATARAKASI). Dalam penelitian ini, PATARAKASI menjadi singkatan dari temuan prototype/model pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang oleh peneliti yaitu Program Transformasi Agrobisnis Kabupaten Sidenreng Rappang. Dapat dimaknai sebagai strategi adaptif dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor pertanian sekaligus sebagai langkah inisiatif secara holistik yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas adaptif pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengoptimalkan sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan demi terwujudnya visi sebagai daerah Agrobisnis yang Maju. Model ini menjadikan konsep *New Public Serice (Serving)* sebagai peran strategis pemerintah daerah dengan mencakup tiga komponen utama kapasitas adapif pemerintah daerah : pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan pembaharuan institusional.

Prototype/ model PATARAKASI akan membantu pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengembangkan kapasitas adaptif secara organisasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan Visi pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Mewujudkan Daerah Agrobisnis yang Maju.

Ket : Gambar Prototype/ Model Program Transformasi Agrobisnis Kabupaten Sidenreng Rappang (PATARAKASI)



KESIMPULAN

Konsep *New Public Service (Serving)* membawa paradigma baru dalam peranan pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas adaptif dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sekaligus upaya mencapai Visi sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju. Di bawah kerangka NPS, peran pemerintah daerah akan terfokus pada pelayanan yang lebih baik dan partisipasi masyarakat yang lebih besar melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan bersama, solusi berbasis data dan bukti, penguatan organisasi pertanian, pemberdayaan masyarakat serta komunikasi dan transparansi. Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah menurut Grindle yang memfokuskan pada dimensi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penguatan Organisasi, dan Pembaharuan Institusional memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Model Program Transformasi Agrobisnis Kabupaten Sidenreng Rappang (PATARAKASI) dijadikan sebagai strategi adaptif dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor pertanian sekaligus sebagai langkah inisiatif secara holistik yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas adaptif pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan demi terwujudnya visi sebagai daerah Agrobisnis yang Maju. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan menjadikan Model Program Transformasi Agrobisnis Kabupaten Sidenreng Rappang (PATARAKASI) sebagai alternatif solusi dan strategi adaptif pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus dalam upaya pencapaian Visi sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju. Melalui penggabungan peran pemerintah dengan konsep *New Public Service (Serving)* dan Dimensi Pengembangan Kapasitas Adaptif dengan memperhatikan aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya : melakukan identifikasi kebutuhan jenis pelatihan SDM pertanian, petani, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pertanian, menyediakan pelatihan sektor pertanian berbasis praktik langsung (studi lapang) secara berkelanjutan, dan mendukung penganggaran dalam pengembangan keahlian lokal dengan melakukan rekrutmen SDM Pertanian (penyuluh), petani milenial dan pemberian reward kepada SDM Pertanian dan petani yang berprestasi. Aspek Penguatan Organisasi diantaranya : pemetaan struktur organisasi, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan program-program yang dijalankan sebagai pendekatan berbasis bukti, mendorong kepemimpinan transformasional dan memfasilitasi kolaborasi antarorganisasi baik secara internal maupun eksternal dalam sinkronisasi program pertanian. Aspek Pembaharuan Institusional diantaranya : melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi kebijakan pertanian, terutama terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mendorong pemerintah daerah dapat melakukan revisi struktur organisasi, termasuk dinas, bidang dan unit-unit kerja yang berkaitan dengan sektor pertanian, mengarahkan pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dan inklusif, memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk mengsosialisasikan program-program dan kebijakan pertanian, mendorong penggunaan alat dan teknologi pertanian yang modern dan memberikan dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana pertanian seperti jalan tani, irigasi, embung dan waduk.

REFERENSI

- Armitage, Derek dan Ryan Plummer (Eds). (2010). *Adaptive Capacity and Environmental Governance*. New York: Springer.
- Denhardt, J. V., & Robert, B. D. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk New York : ME. Sharpe.
- Grindle, M. (1997). *Getting good government: capacity building the public sector of developing countries*. Boston: Harvard Insti-tute for International Development.
- Grindle, M. S. (1997). *Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries*. *World Development*, 25(4), 481-495.
- Gupta, J., C. Termeer, J. Klostermann, S. Meijerink, M. Brink, P. Jong, Nooteboom dan E. Bergsma. (2010). *The Adaptive Capacity Wheel: A Method To Assess The Inherent Characteristics Of Institutions To Enable The AdaptiveCapacity Of Society*. *Environmental science & Policy* 13:459-471.
- Milen, A. (2015). *What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*, World Health Organization. Geneva: Departement of Health Service Provision.
- Norman, NA, Razak, AR, & Kasmad, R. (2020). *Adaptive Governance dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*,1(1), 145-161.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Termeer, C., Gupta, J., Klostermann, J., Meijerink, S., Brink, M. V., Jong, P., et al. 2015. *The Adaptive Capacity Wheel: A Method to Asses the Inherent Characteristic of Institutions to Enable The Adaptive Capacity of Society*. *Environmental Science and Policy*, pp. 459-471.
- UNDP, Bappenas. (2010). *Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Zaenuri, M. (2012). *Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance*. 157–168.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023.
- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 2018. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021. Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021. Data Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.